

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Literatur Reviu

Pada sebuah karya tulis ilmiah, terutama skripsi, tidak ada yang bersifat asli (*original*) maupun baru dipublikasikan oleh penulis. Semua bentuk penelitian tersebut tidak dapat terlepas dari penelitian terdahulu ataupun melakukan revisi terhadap penelitian terdahulu. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa penting melakukan perbandingan terhadap karya tulis terdahulu mengenai Dampak Industrialisasi China terhadap Krisis Finansial Amerika Serikat. Untuk itu, penulis akan meninjau kembali beberapa sumber literatur terdahulu terkait dengan Dampak Industrialisasi China terhadap Krisis Finansial Amerika Serikat.

Penelitian yang ditulis oleh Jagannath Panda, yang berjudul “**Asia-Africa Growth Corridor (AAGC): An India-Japan Arch in the Making?**” pada tahun 2017, membahas tentang prospek ambisius yaitu Asia-Africa Growth Corridor (AAGC). Penelitian ini berisi visi kolaboratif antara India dan Jepang serta kerjasama antara Afrika dan Asia untuk mempromosikan pembangunan, konektivitas, dan sebagai bagian dari “tatanan liberal dan berbasis nilai”. Jagannath Panda berpendapat bahwa asal usul dari kerjasama ini diambil dari konvergensi kepentingan ekonomi dan strategis India dan Jepang yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Jepang dan India memiliki kekhawatiran atas pengaruh strategis China yang tumbuh, khususnya melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), yang merupakan salah satu dari faktor utama.

Selanjutnya ada terdapat penelitian yang ditulis oleh Okso Marisi, yang berjudul **“Faktor – faktor yang mempengaruhi India membentuk Asia Africa Growth Corridor (AAGC)”** pada tahun 2019. Okso Marisi berpendapat bahwa Asia merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis, ia berpendapat bahwa Asia membutuhkan pasar dan bahan mentah. Sama dengan yang terjadi di Afrika, berada di jalur pertumbuhan dan menyediakan pasar sebagai bahan baku. Menurutnya, keadaan ini akan menjadi peluang bagi negara-negara di Kawasan Asia dan Afrika untuk mewujudkan potensi ekonomi dan membangun kemitraan strategis untuk pertumbuhan dan pembangunan bersama. Peluang dan aspirasi kedua benua ini dapat dihubungkan melalui Koridor Pertumbuhan Asia Afrika (AAGC). Dalam visi dan misi *Asia Africa Growth Corridor* (AAGC), India mewakili Asia dan sebagai pemain penting dalam AAGC.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

### **2.2.1 Ekonomi Politik Internasional**

Berdasarkan pandangan Robert Gilpin, terdapat tiga teori besar yang dianggap sebagai *Grand Theories* dalam studi Ekonomi Politik Internasional, yaitu liberalisme dimana memiliki dasar asumsi bahwa pasar adalah entitas yang secara terpisah yang tidak dapat diintervensi baik oleh penguasa pemerintah atau pemegang kekuasaan dalam politik, merkantilisme yang memiliki pandangan bahwa negara adalah aktor yang paling dominan dalam ekonomi politik internasional, dan marxisme yang menganggap bahwa terdapat adanya segregasi diantara kelas borjuis-proletar dalam ekonomi politik internasional. Dari pemaparan tersebut, penulis menggunakan perspektif liberal, yakni

perspektif yang meyakini bahwa intervensi negara terhadap pasar akan memperburuk perekonomian suatu negara. Kemudian juga penulis menggunakan perspektif neoliberalisme yang merupakan bentuk baru dari pandangan liberalisme dalam menganalisis posisi strategis *Asia Africa Growth Corridor (AAGC)* dalam peningkatan pembangunan ekonomi di India.

Pakar ekonomi, John Maynard Keynes, mengatakan bahwa dalam liberalisme pemerintah harus melakukan campur tangan dalam mengendalikan dan mengatur jalannya perekonomian nasional. Pihak swasta masih dapat mendapatkan kepemilikan faktor faktor produksi dan kegiatan produksi, namun pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewajiban dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang secara aktif akan dan harus mampu mempengaruhi gerak perekonomian negaranya. Hal ini dapat kita lihat dimana saat ini India dituntut untuk memainkan peran yang lebih progresif sebagai suatu negara untuk mengambil peran besar dalam sistem internasional.

Ekonom Goldman Sachs (bank investasi terbesar AS) pada tahun 2001 memperkirakan bahwa India dan China, akan menjadi empat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Perkiraan Goldman Sachs kemudian dapat dibuktikan dengan terjadinya tren positif pertumbuhan ekonominya dalam beberapa dekade terakhir India dan bila India terus meningkatkan atau setidaknya mempertahankan pertumbuhan tersebut maka apa yang diperkirakan oleh Goldmann itu bukan mustahil menjadi kenyataan.

Pada tahun 1991, India mengalami kebangkrutan total 110 juta orang yang hanya dalam waktu dua tahun sebelumnya masih stabil kemudian jatuh ke dalam kemiskinan. Inflasi saat itu mencapai 17 % dan memematikan pendapatan rakyat kurang mampu. Hingga 1991, 330 juta orang, atau 2 dari 5 orang India hidup dibawah garis kemiskinan (Meredith, 2007). Keuangan pemerintah tidak dapat mengatasi inflasi dengan baik dan jatuh. India kemudian mengalami krisis. Bank bank telah menutup pinjaman India, sedangkan pada saat itu India memiliki cadangan devisa yang telah jatuh ke tingkat yang hanya bisa membiayai dua minggu impor minyak. Saat itu *International Monetary Fund (IMF)* ingin membantu India namun tentu saja dengan apabila India setuju dengan adanya beberapa perubahan. Kemudian pada 1 Juli 1991, Manmohan Singh, Menteri Keuangan India saat itu, mendevalusi mata uang India lebih dari 9 % dalam upaya untuk mendorong peningkatan ekspor, yang akan mendatangkan mata uang asing yang sangat diperlukan. Selain itu, Menteri Perdagangan India, R. Chidambaram ia membuat sejumlah reformasi struktural untuk mendorong ekspor dan mengumumkan mengangkat pembatasan impor. India kemudian mengumumkan mendapat pinjaman sebesar 2 miliar dollar dari IMF untuk menangani krisis. Selama 2 tahun berikutnya, pemerintah memulai perubahan hampir setiap minggunya. Bank milik pemerintah, dan industri minyak bumi terbuka bagi semua investor asing. Secara keseluruhan, efek dari reformasi ekonomi di India sangat besar. Ekonomi berkembang lebih pesat dari pada dekade sebelumnya.

India telah menghabiskan berpuluh puluh tahun dalam pengasingan ekonomi yang dipaksakan sendiri, dan walaupun hal itu adalah pengasingan yang bertujuan baik,

rakyatnya terperosok dalam kemiskinan. Hal ini berasal dari perjuangan India dalam meraih kemerdekaan dari Inggris. Kemudian India dihadapkan dengan tantangan pascakolonial, mulai dari pergerakan politik yang dihadapi baru baru ini saat memperkenalkan diri kembali kepada komunitas bisnis global. Namun, ada hal yang harus diingat bahwa India telah menerima bantuan dari *International Monetary Fund* (IMF) dimana IMF bersedia untuk membantu India dengan catatan pemerintah India menyetujui untuk membuat beberapa perubahan pada agenda reformasi di bidang ekonomi. Melalui bantuan IMF, India melaksanakan *Structural Adjustment Programs* (SAPs). Seperti yang dijelaskan Budi Winarno, dalam bukunya, *Etika Pembangunan yaitu Pertarungan Negara VS Pasar* bahwa SAPs ini menjadi biang menajamnya kemiskinan dan kesenjangan. SAPs ini adalah paket kebijakan yang sejalan dengan neoliberalisme yang memiliki tujuan mengupayakan agar negara-negara penerima bantuan IMF untuk membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya *Multinational Corporation* (MNC) untuk memperoleh akses tenaga kerja yang murah dan SDM. Program ini juga mengintegrasikan negara miskin kedalam sistem ekonomi global. Winarno mencontohkan kasus Venezuela sebagai bukti bahwa kemiskinan dan kesenjangan semakin menajam setelah negara ini menerima paket bantuan IMF melalui program SAPs.

Saat ini neoliberalisme telah menjadi aturan standar dalam perdagangan antar negara. Contohnya, jika suatu negara ingin menjadi anggota WTO, lalu negara tersebut akan otomatis mendapatkan pembagian kuota ekspor, namun sebelumnya, negara tersebut harus terlebih dahulu bersedia menerapkan neoliberalisme sebagai dasar

kebijakan ekonominya. Hal yang sama pula dialami oleh India pada tahun 1995, India sebelumnya dikenal sebagai negara yang relatif tertutup, oleh karena hal tersebut, maka pasha India sulit ditembus oleh pihak asing. Prinsip perdagangan bebas yang ditentukan WTO (*Free Trade Organization*) sebenarnya didasarkan pada asumsi dari ekonomi liberal klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo (1771-1823), dimana asumsi tersebut juga berbicara tentang keuntungan komparatif. Didalam konsep *Comparative Advantage*, upah buruh digunakan sebagai patokan oleh Ricardo melakukan komparasi keuntungan antar produk untuk menentukan tingkat efisiensi produksi suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, menurut Ricardo, suatu negara harus berspesialisasi pada produk tersebut dalam melakukan transaksi internasional dan negara yang dalam produknya mengeluarkan upah buruh serendah-rendahnya.

### **2.2.2 Kerjasama Ekonomi Internasional**

Kerjasama ekonomi merupakan bagian dari studi Ekonomi Politik Internasional. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa “Politik Luar Negeri pada hakikatnya adalah alat negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijaksanaan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta jangka pendek dan jangka panjang” (Kusumaatmadja, 1983). Sedangkan Kebijakan Luar Negeri itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya *The International Relations*, yaitu

*“Foreign policy is strategy of plan course of action developed by decision makers of a state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest” (OLTON, 1979)*

Dalam melakukan hubungan internasional terdapat beberapa interaksi antar negara-negara, interaksi tersebut dapat berbentuk perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional (Mas'ood, 1990). Pasca Perang Dingin, hubungan antar negara didunia lebih bervariasi karena mulai muncul bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan.

Menurut K. J. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (Holsti, 1988):

- a) Pandangan bahwa jika terdapat dua atau lebih kepentingan, maka nilai dan tujuan akan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, kemudian dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dengan berbagai perjanjian dan kerjasama dan dengan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama dalam studi hubungan internasional merupakan salah satu dari interaksi antar aktor hubungan internasional dimana didalamnya terdapat kepentingan dari setiap negara. Negara yang memiliki tujuan dan ingin melengkapi kepentingan nasionalnya biasanya akan membuat kesepakatan dan membuat pakta kerjasama. Kerjasama biasanya dibuat dengan memperhatikan hubungan interdependensi atau ketergantungan dalam upaya pemenuhan kepentingan nasional suatu negara. Koesnadi Kertasmita mendefinisikan kerjasama internasional didalam bukunya, menurutnya organisasi internasional adalah : “Kerjasama Internasional terjadi karena nation understanding dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama ini didasari oleh kepentingan-kepentingan bersama diantara negar-negara, namun kepentingan tersebut tidak identik”(Kartasmita, 1983). Isu utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama ada bidang tertentu.

Kerjasama internasional terbagi atas dua bentuk, antara lain :

1) Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*);

2) Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*), kerjasama ini biasanya kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Selain bentuk-bentuk di atas, kerjasama internasional juga dibagi dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional.



Kerjasama bilateral yang dikoordinasikan oleh Bagian Kerjasama Bilateral di suatu negara, contohnya pada kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan suatu negara yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan keduanya telah menandatangani persetujuan atau agreement yang akan menjadi dasar dan panduan atas semua bentuk kerjasama yang akan dilakukan.

### **2.2.3 Rezim Internasional**

Stephen D. Krasner (1982: 186) menyatakan bahwa rezim internasional adalah rangkaian prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit dimana ekspektasi para aktor berkumpul di area yang ada dalam hubungan internasional. Prinsip merupakan keyakinan atas suatu fakta, sebab, dan kebenaran. Norma merupakan standar perilaku yang berlaku berdasarkan oleh hak dan kewajiban. Peraturan merupakan ketentuan maupun larangan spesifik atas suatu aksi yang telah dibuat dan sepakatu. Prosedur pengambilan keputusan merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan umum.

Terdapat empat dimensi atau aspek yang membentuk rezim, yaitu kekuatan, bentuk organisasi, cakupan, dan modus alokasional (Haggard dan Simmons, 1987: 496-498). Pertama, berdasarkan kekuatannya, kekuatan suatu rezim diukur dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perintah rezim, terutama ketika kepentingan jangka pendek pribadi masyarakat tidak sejalan dengan peraturan dalam rezim. Kedua, bentuk organisasi yang kuat harus didukung dengan adanya aparat administratif yang baik karena kerja sama yang kompleks membutuhkan kecermatan dan organisasi yang

otonom. Ketiga, cakupan rezim yang terlalu luas dapat meningkatkan biaya administratif dan kompleksitas, sedangkan cakupan rezim yang terlalu sempit juga akan mempersempit ruang untuk tawar-menawar dan hubungan antar-isu. Keempat, rezim dapat mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya. Seperti rezim berorientasi pasar, misalnya, yang mendukung alokasi khusus untuk sumber daya, pelarangan kontrol pusat, jaminan hak-hak properti, dan memfasilitasi kontrak pribadi.

Perkembangan dan perubahan studi rezim dapat dikategorikan ke dalam empat pendekatan teori, yaitu teori struktural, *game-theory*, fungsional, dan kognitif (Haggard dan Simmons, 1987: 498). Pertama, teori struktural khususnya membahas mengenai stabilitas hegemon dengan menjelaskan bagaimana kondisi internasional memungkinkan terjadinya kerja sama dan bahwa kebijakan nasional tidak dapat disimpulkan secara lugas. Kedua, *game-theory* menggabungkan preferensi faktor eksternal yang telah ditentukan secara berurutan dan semua faktor domestik yang kemungkinan bertabrakan dengan preferensi negara menjadi analisa, dan sebagian besar penelitian menekankan bahwa aktor dibatasi oleh struktur permainan antar-negara. Ketiga, teori fungsional mengasumsikan aktor rasional namun juga memperkenalkan ketidaksempurnaan pasar, transaksi, informasi biaya, dan ketidakpastian. Keempat, inti dari teori kognitif adalah bahwa kerja sama tidak dapat dijelaskan dengan tepat tanpa adanya referensi ideologi, nilai-nilai aktor, kepercayaan mengenai isu-isu interdependensi, dan kesadaran akan tujuan-tujuan spesifik.

Kesimpulannya, Ilmu Hubungan Internasional tidak dapat terlepas dari rezim-rezim internasional. Hubungan internasional sebagai science membutuhkan sebuah aturan yang mengikat setiap negara dan sebuah intitusi yang bertugas untuk merumuskan peraturan, mengkomunikasikan, mengelola, menafsirkan, melegitimasi, dan mengadaptasikan. Untuk membuat sebuah peraturan yang baik, ada empat dimensi atau aspek yang harus diperhatikan yaitu kekuatan, bentuk organisasi, cakupan, dan modus alokasional. Sedangkan terdapat empat teori pendekatan yang dapat digunakan untuk meninjau rezim internasional yaitu teori struktural, game-theory, fungsional, dan kognitif. Karena Hubungan Internasional berkembang dengan sangat pesat, maka dibutuhkan rezim yang senantiasa relevan dengan situasi internasional dan institusi yang terkelola dan terstruktur dengan baik.

#### **2.2.4 Teori Keunggulan Kompetitif dan Komparatif / *Competitive and Comparative Advantage***

Teori keunggulan komparatif (*The Law of Comparative Advantage*) dari Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung, selama rasio harga 3 antar negara masih berbeda jika dibandingkan tidak ada perdagangan (Ruffin, 2002). Ricardo berpendapat bahwa keabsahan teori nilai berdasar tenaga kerja (*labor theory of value*) yang menyatakan hanya satu faktor produksi yang penting yang menentukan nilai suatu komoditas yaitu tenaga kerja. Nilai suatu komoditas adalah proporsional (secara langsung) dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk

menghasilkannya. Namun teori ini memiliki kelemahan dimana terdapat pernyataan Ricardo terkait bagaimana tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi, selain itu ia juga berpendapat bahwa output persatuan input tenaga kerja dianggap konstan (Dan & Kemitraan, n.d.). Teori keunggulan komparatif Ricardo kemudian disempurnakan oleh G. Haberler yang mengartikan (*labor theory of value*) tersebut hanya digunakan untuk barang antara, sehingga menurut G. Haberler teori biaya imbalan atau disebut dengan (*theory opportunity cost*) dipandang lebih relevan. G. Haberler memiliki argumentasi dasar bahwa harga relatif dari komoditas yang berbeda ditentukan oleh perbedaan biaya. Maksud dari biaya disini menunjukkan produksi komoditas alternatif yang harus dikorbankan untuk menghasilkan komoditas yang bersangkutan. Selanjutnya teori Heckscher Ohlin tentang pola perdagangan menyatakan bahwa: komoditi-komoditi yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi (yang melimpah) dan faktor produksi (yang langka) diekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi dalam produksi yang sebaliknya. Jadi secara tidak langsung faktor produksi yang melimpah diekspor dan faktor produksi yang langka diimpor (Ohlin,1933, hal. 92 dalam Lindert dan Kindleberger, 1993). Menurut Simatupang (1991) serta Sudaryanto dan Simatupang (1993) konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Selanjutnya Simatupang (1995) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis melalui koordinasi vertikal sehingga produk akhir

dapat dijamin dan disesuaikan preferensi konsumen akhir. Implementasinya di lapangan oleh pelaku agribisnis dilakukan dengan membangun kelembagaan kemitraan usaha dalam berbagai pola kemitraan usaha. Terkait dengan konsep keunggulan komparatif adalah kelayakan ekonomi, dan terkait dengan keunggulan kompetitif adalah kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sedangkan analisa ekonomi menilai suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Kadariah dkk, 1978). Sudaryanto dan Simatupang (1993) mengemukakan bahwa konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau *revealed competitive advantage* yang merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual. 4 Keunggulan komparatif berubah karena faktor yang mempengaruhinya. Scydlowsky (1984) dalam Zulaiha (1996) mengatakan bahwa faktor-faktor yang berubah adalah ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi. Keunggulan kompetitif adalah alat untuk mengukur kelayakan aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga pasar nilai uang resmi yang berlaku (berdasar analisis finansial). Komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif dikatakan juga memiliki efisiensi secara finansial.

Dalam menganalisa perkembangan ekonomi di India, penulis juga menggunakan Teori Keunggulan Kompetitif atau keunggulan bersaing (*competitive advantage*) dimana teori tersebut berbicara tentang kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Istilah ini

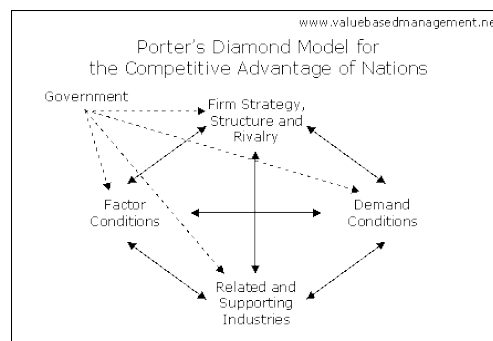
berasal dari judul buku yang ditulis oleh Michael Porter, *Competitive Advantage* (1985), teori ini dibuat sebagai jawaban atas kritik terhadap konsep keunggulan komparatif. Porter merumuskan dua jenis keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu biaya rendah atau diferensiasi produk. Pada era saat ini, India sebagai negara yang ingin mengembangkan perekonomiannya harus memiliki daya saing serta strategi untuk mengantisipasi meluasnya persaingan di pasar global, oleh karena itu penulis mengamati perkembangan ekonomi India menggunakan teori permintaan. India saat ini bersaing dengan China dalam pengaruh di kawasan Asia dan Afrika. Dalam hal ini, India tentunya membutuhkan nilai jual lebih agar tentunya dapat merebut perhatian dari pasar internasional. Dalam hal ini, Porter menyatakan bahwa salah satu cara untuk memenangkan persaingan tersebut adalah dengan memiliki keunggulan kompetitif sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Memfokuskan diri untuk keunggulan kompetitif yang dimiliki dapat dilakukan dengan cara efektivitas operasional. *Operational effectivitas* jika dikombinasikan dengan strategi yang tepat adalah jalan untuk mencapai kinerja yang unggul. Sehingga dengan memaksimalkan keunggulan tersebut akan tercapailah keunggulan kompetitif yang diharapkan. Efektivitas operasional membuat kita untuk menampilkan sesuatu yang dapat baik dari pesaing. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan input, misalnya dengan cara mengurangi cacat pada produk yang dihasilkan atau memproduksi massal suatu produk dan selau dapat mengiapkan barang dengan cepat dari permintaan pasar . Keunggulan kompetitif merupakan istilah yang dipakai oleh perusahaan yang berskala besar, sehingga tentunya hal ini merupakan hal utama yang

harus dimiliki untuk bisa bersaing di pasar internasional simak juga faktor penyebab inflasi. India saat ini dihadapkan dengan persaingan dagang dengan China di kawasan Asia dan Afrika. India harus memiliki keunggulan untuk menarik minat pasar. Seperti yang kita ketahui, produk China telah merambah keseluruhan dunia terutama di Asia dan Afrika. Produk yang dihasilkan oleh China sangat bervariasi dan memiliki nilai jual yang rendah. Dapat disimpulkan, semakin banyak perusahaan yang berada di bidang yang sama maka persaingan yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Kompetitif advantage harus dimiliki perusahaan tersebut agar dapat menjadi market leader bagi usaha sejenisnya. Meskipun sudah menjadi *market leader*, pasar akan tetap didatangi oleh pesaing yang lain. Penulis berpendapat, jika India tidak meningkatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya maka status *market leader* tidak akan bisa dipertahankan.

### 2.2.5 Porter' s Diamond Theory

Dalam menganalisis perekonomian India, penulis menggunakan pemikiran Porter, Porter membedakan empat faktor dasar yang saling terkait dan dapat mendorong atau menghambat daya saing suatu negara, yang kemudian dikenal dengan *Porter' s Diamond Theory* (Ediana, et al., 2007), antara lain :



Gambar 1 Porter's Diamond Theory Sumber : Abbey, 2012

1. Faktor Kondisi, dimana kekuatan suatu negara yang dilihat berdasarkan faktor-faktor produksi yang dimiliki negara tersebut. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan infrastruktur.
2. Faktor Permintaan, yaitu berkaitan dengan permintaan akan barang dan jasa oleh konsumen yang berada dalam suatu negara, dimana permintaan tersebut dipengaruhi oleh komposisi keinginan dan kebutuhan konsumen, jangkauan pasar dan tingkat pertumbuhan pasar, mekanisme penyaluran kebutuhan dan keinginan konsumen domestik ke pasar luar negeri.
3. Faktor Industri Pendukung, berkaitan dengan ketersediaan industri yang dapat memasok dan mendukung persaingan internasional.
4. Faktor Strategi, Struktur, dan Persaingan, mengacu pada bagaimana suatu perusahaan dijalankan, diorganisasikan, bagaimana struktur manajemen yang ada, serta bagaimana kondisi persaingan di pasar.

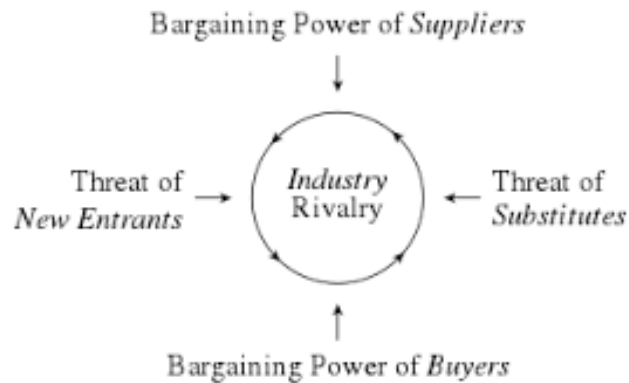
Dalam skala nasional, pemerintah juga berperan untuk memperkuat daya saing suatu negara di luar negeri, misalnya melalui standarisasi mutu produk dan mendorong kerjasama antara pemasok dan pembeli (Endy, 2018).

### ***Portes's Five Forces Analysis***

Michael E. Porter memaparkan lima kekuatan strategi bisnis yang sangat menjadi penentu dan menjadi daya tarik pasar (*Portes's Five Forces Analysis*).

Kelima strategi tersebut akan dibahas dalam poin dibawah ini :





**Gambar 2 Porter's Five Forces Analysis Sumber : Wikipedia, 2021**

1. *Threat of New Entrants* / Hambatan bagi Pendetang Baru.

Jika Industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyak perusahaan saingan (kompetitor) yang bersaing pada market yang sama maka profit atau laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru maka posisi perusahaan kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Beberapa hambatan bagi para pendatang baru diantaranya adalah seperti : Memerlukan dana atau modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, hak paten dan merek dagang, skala Ekonomi, loyalitas Pelanggan serta peraturan pemerintah.

2. *Bargaining power of suppliers* / Daya Tawar Pemasok

Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena

memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaankita. Daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya, hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun pemasok memonopoli bahan baku yang ada.

### 3. *Bargaining power of buyers* / Daya Tawar Pembeli

Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli/konsumen, semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, Perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli maka semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Daya tawar pembeli tinggi apabila jumlah produk pengganti yang banyak, banyak stok yang tersedia namun hanya sedikit pembelinya.

### 4. *Threat of substitutes* / Hambatan bagi Produk Pengganti

Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli/konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan kita.

#### 5. *Rivalry among existing competitors* /Tingkat Persaingan dengan Kompetitor

Kekuatan ini adalah penentu utama, perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan tersebut akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan pada pasar yang sama tersebut yang rendah. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama, loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat dengan cepat digantikan dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Teori keunggulan kompetitif dan penjabarannya, tentu menjadi sumber kajian dan referensi tentang bagaimana India meningkatkan perekonomiannya, dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif untuk bisa menembus pasar global.

#### **2.2.6 Kebijakan Industrialisasi Orientasi Ekspor (IOE)**

Kemudian Bob Hadiwinata menyebutkan di dalam Politik Bisnis Internasional yaitu,

**“Politik bisnis internasional merupakan studi yang membahas bisnis internasional dari kacamata politik, dimana faktor power (kekuasaan) dan struktur dianggap sebagai faktor-faktor penting yang mempengaruhi perilaku aktor-aktor negara dan nonnegara (seperti kelompok bisnis, lembaga keuangan internasional, rezim internasional dll) dalam melakukan transaksi bisnis antar bangsa dan antarwilayah.”**

Terdapat dua strategi umum yang diterapkan oleh negara berkembang dalam usaha menekan defisit transaksi berjalan pemerintah, yang pertama adalah kebijakan industri-substitusi impor dan yang kedua adalah industri orientasi ekspor (Krugman, Paul R.; Obstfeld, 2003). Kebijakan industri substitusi impor adalah yang paling sering digunakan oleh negara berkembang. Kebijakan ini dilaksanakan dengan membatasi impor produk manufaktur untuk merangsang pertumbuhan sektor manufaktur di industri domestik (Krugman, Paul R.; Obstfeld, 2003). Kebijakan ini kerap diterapkan sebab industri manufaktur di negara berkembang belum mampu berkompetisi dengan industri manufaktur dari negara maju yang telah berdiri dengan mapan. Dengan adanya restriksi impor melalui tarif dan kuota, industri dalam negeri diharapkan dapat berdiri dengan kokoh terlebih dahulu sebelum dapat diluncurkan ke pasar dunia yang kompetitif. Sedangkan cara lain mendukung manufaktur adalah melalui Industrialisasi Orientasi Eskpor (IOE). IOE memiliki karakteristik tertentu antara lain teknologi yang dipilih adalah teknologi padat karya yang dapat memberikan efek distribusi pendapatan yang lebih langsung dan lebih besar kepada anggota masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang luas sehingga menimbulkan efek langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta berorientasi pada perdagangan bebas karena ketergantungan pada pasar internasional. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan strategi IOE ini yaitu persyaratan pendapatan per kapita mulai dari \$800 sampai lebih dari \$2000, kehadiran sebuah Negara yang kuat untuk mengontrol kekuatan internal maupun eksternal yang berpotensi menentang proses industrialisasi dan harus mampu mengeluarkan kebijakan kontroversial seperti pengontrolan upah buruh, suku bunga,

inflasi, devaluasi, subsidi, pemberian insentif bagi eksportir, pemindahan sumber-sumber transektoral. Akan tetapi di Negara-negara berkembang lebih terkenal industrialisasi substitusi impor karena substitusi impor secara langsung menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan yang kuat dan mapan, sementara promosi ekspor tidak banyak penyokongnya (Krugman, Paul R.; Obstfeld, 2003).

Selama ini pembangunan ekonomi hanya dinilai meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan.

### **2.2.7 Kebijakan Ekonomi India**

Liberalisasi ekonomi di India adalah upaya yang dimulai pada tahun 1991 untuk membuat ekonomi India menjadi lebih berorientasi terhadap pasar dan memperbesar peran sektor swasta dan penanam modal asing. Kebijakan-kebijakan yang mulai dilakukan adalah penurunan tarif impor, deregulasi pasar, dan penarikan investasi asing. Bagi para pendukungnya, kebijakan liberalisasi dianggap telah membantu membuat pertumbuhan ekonomi India menjadi pesat pada tahun 1990-an dan 2000-an. Namun, kebijakan ini juga ditentang karena dianggap telah meningkatkan kemiskinan, kesenjangan, dan degradasi ekonomi. Arah liberalisasi sendiri selama beberapa dasawarsa terakhir relatif sama, meskipun partai yang berkuasa berganti-ganti, walaupun belum ada partai yang mampu menyelesaikan isu yang sulit secara politik seperti liberalisasi hukum buruh. Saat ini para ahli di India masih memperdebatkan faktor apa yang membuat reformasi ekonomi ini menjadi berkelanjutan. Pemerintah

India telah disarankan untuk meneruskan kebijakan liberalisasi. Ekonomi India sendiri tumbuh dengan laju yang lebih lambat dari Republik Rakyat Tiongkok, yang telah meliberalisasi ekonominya semenjak tahun 1978. *The McKinsey Quarterly* states menyatakan bahwa bila hambatan-hambatan utama terhadap ekonomi India dihilangkan, ekonominya dapat tumbuh secepat Tiongkok dengan laju 10% per tahun.

Ekonomi India pernah tertinggal dibanding negara berkembang lainnya. Negeri itu dulu identik dengan angka kemiskinan yang tinggi di Asia akibat kebijakan pemerintah pusat salah sasaran, birokrasi buruk, dan tarif pajak di luar kewajaran. Tak ingin terjebak dalam situasi sama, momentum kebangkitan India jadi slogan kampanye Modi yang akhirnya terpilih sebagai perdana menteri pada 2014. Ia menyerukan reformasi ekonomi yang sempat mandek selama bertahun-tahun agar India mampu bertahan dalam percaturan global. Satu per satu usaha dilakukan seperti merombak undang-undang kepailitan, menerapkan pajak penjualan nasional untuk mengganti retribusi, hingga membuka pintu investasi. Selain itu, Narendra Modi juga menghemat anggaran pengeluaran negara, mempersingkat jalur birokrasi, mengurangi regulasi penghambat bank. Pembangunan infrastruktur Modi menyoar perbaikan jaringan listrik, sanitasi air, sampai layanan transportasi.

### **2.2.8 Asia Africa Growth Corridor (AAGC)**

*Asia Africa Growth Corridor* (AAGC) terbentuk saat deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan Perdana Menteri Shinzo Abe pada November 2016. AAGC berisi tentang strategi pertumbuhan berkelanjutan yang berpusat pada manusia, yang detailnya akan dikembangkan melalui proses konsultasi

terperinci di seluruh Asia dan Afrika, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Koridor Pertumbuhan Asia dan Afrika ini berisi empat pilar Proyek Pembangunan dan Kerjasama, Infrastruktur Berkualitas dan Konektivitas Kelembagaan, Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan, dan kemitraan Orang-ke-Orang. Sentralitas *people to people partnership* akan menjadi salah satu keunggulan dari kerjasama ini.



**Gambar 3 Asia Africa Growth Corridor: Vision Document, 2017**

Tujuan dari visi dan misi AAGC akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan di berbagai negara dan sub-wilayah Afrika, dengan memanfaatkan homogenitas dan heterogenitas yang simultan di antara mereka. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan keterkaitan antara dan dengan Asia dan Afrika untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Proyek-proyek pembangunan di bidang kesehatan dan farmasi, pertanian dan pengolahan hasil

pertanian, manajemen bencana dan peningkatan keterampilan akan menjadi prioritas pada program AAGC. Aspek konektivitas AAGC akan dilengkapi dengan infrastruktur berkualitas. Pertumbuhan yang dipimpin AAGC di Afrika dan Asia akan responsif terhadap komitmen kolektif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). The AAGC Vision Study akan menggunakan *Geographical Simulation Model* (GSM) untuk menghasilkan keuntungan ekonomi untuk Afrika melalui integrasinya dengan India, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur dan Oseania (Countries & Asia, 2017). *Asia Africa Growth Corridor* akan berkontribusi untuk mengembangkan mekanisme dan model kelembagaan untuk menghubungkan bisnis, orang, dan lembaga pemikir yang mewakili, dan berkontribusi pada, upaya integrasi di Asia dan Afrika.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta perumusan masalah, maka penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

**“ Jika program kerjasama *Asia Africa Growth Corridor* (AAGC) merupakan potensi bagi pengembangan infrastruktur, kemitraan strategis serta kelembagaan dan pengembangan agroindustri, maka tindakan dan strategi serta kelembagaan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi IPTEK, merupakan penciptaan daya saing dalam mendukung pembangunan ekonomi India”**



## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas : <b>Program kerjasama Asia Africa Growth Corridor (AAGC)</b>	Pengembangan infrastruktur	Masih ada potensi besar dan belum tergali di antara, dan di antara Asia dan Afrika, yang perlu digali untuk pertumbuhan bersama, pembangunan, perdamaian, kemakmuran dan stabilitas kawasan ini. Peluang dan aspirasi di kedua kawasan tersebut dapat dihubungkan melalui Koridor Pertumbuhan Asia Afrika (AAGC).  Sumber : <a href="https://www.eria.org/Asia-Africa-Growth-Corridor-Document.pdf">https://www.eria.org/Asia-Africa-Growth-Corridor-Document.pdf</a>
	Kemitraan strategis dan kelembagaan	Asia Africa Growth Corridor (AAGC), sebuah visi kolaboratif India-Jepang mengenai pembangunan, konektivitas dan kerja sama antara Asia dan Afrika, diumumkan pada tahun 2017  Sumber : <a href="https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files">https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files</a>

		<a href="#">/taniguchi asia africa growth corridor 2020.pdf</a> <a href="#">f</a>
	Pengembangan agroindustri	<p>Pengalaman India dalam menggunakan layanan ICT (Information, Communications, Technology) di bidang pertanian dan administrasi sangat penting bagi Afrika.</p> <p>Sumber : <a href="https://www.eria.org/Asia-Africa-Growth-Corridor-Document.pdf">https://www.eria.org/Asia-Africa-Growth-Corridor-Document.pdf</a></p>
Variabel Terikat : <b>Pendukung pembangunan ekonomi di India</b>	Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di India.	<p>India keahlian luar biasa dalam mengembangkan kemampuan penelitian kesehatan dan biomedis, program pemberantasan manajemen penyakit di seluruh dunia, serta menyediakan pusat keunggulan dalam pembangkit tenaga biomedis dengan ekspor obat yang signifikan di seluruh dunia. India tumbuh sebagai pusat manufaktur untuk vaksin dan pemasok terkemuka untuk negaranegara maju, yang telah memasok lebih dari 60% dari permintaan negara Asia dan Afrik.</p> <p>Sumber : Harpreet Sandhu, Health Sector Cooperation in Asia Africa Growth Corridor,</p>

		Research and Information System for Developing Countries
	Modernisasi IPTEK	AAGC akan dikembangkan melalui infrastruktur berkualitas dan dilengkapi dengan konektivitas digital dan regulasi.  Sumber : <a href="https://www.eria.org/Asia-Africa-Growth-Corridor-Document.pdf">https://www.eria.org/Asia-Africa-Growth-Corridor-Document.pdf</a>

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

